

# Sinergi Kewarganegaraan dan Kefarmasian dalam Menangani Masalah Narkotika di Indonesia

Aulia Zahra Annabilah<sup>1</sup>, Azhari Arief Budiman<sup>2</sup>, Annisa Zahra Rahmayati<sup>3</sup>,  
Aditya Fadlurrahman<sup>4</sup>, Amanda Fitriyani Auliya<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Fakultas Farmasi, Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia

e-mail: [auliazahraannabilah2815@gmail.com](mailto:auliazahraannabilah2815@gmail.com), [azhariariefbudiman@gmail.com](mailto:azhariariefbudiman@gmail.com),  
[azahrarahmayati170204@gmail.com](mailto:azahrarahmayati170204@gmail.com), [adityafadlurrahman30@gmail.com](mailto:adityafadlurrahman30@gmail.com),  
[amandafitriyaniauliya49@gmail.com](mailto:amandafitriyaniauliya49@gmail.com)

## Article Info

### Article history:

Received January 09, 2026

Revised January 20, 2026

Accepted January 22, 2026

### Keywords:

Citizenship, Pharmacy,  
Narcotics, Drug Abuse  
Prevention.

## ABSTRACT

*Drug abuse in Indonesia is a multidimensional problem that not only affects individual health but also threatens social and national security. The high prevalence of drug abuse indicates the need for a comprehensive and sustainable approach. This study aims to examine the role and synergy of citizenship and pharmacy in efforts to prevent and combat drug abuse in Indonesia. The method used is a qualitative approach with a literature study design, through a search of relevant national and international scientific articles published in the last 5-10 years. The results of the study show that civic values play an important role in shaping legal awareness, social responsibility, and active community participation in preventing drug abuse. Meanwhile, the pharmaceutical profession has a strategic contribution through the supervision of medical drug use, the application of the principles of rational drug use, and education to the community about the risks of drug abuse. The synergy between citizenship and pharmacy enables the formation of a prevention system that is not only repressive but also educational and preventive. Thus, the integration of these two roles is key to strengthening national efforts to reduce drug abuse rates in a sustainable manner and create a healthy, law-abiding, and responsible society.*

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



## Article Info

### Article history:

Received January 09, 2026

Revised January 20, 2026

Accepted January 22, 2026

### Kata kunci:

Kewarganegaraan,  
Kefarmasian, Narkotika,  
Pencegahan Penyalahgunaan  
Narkoba.

## ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia merupakan permasalahan multidimensional yang tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga mengancam ketahanan sosial dan nasional. Tingginya prevalensi penyalahgunaan narkotika menunjukkan perlunya pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran dan sinergi kewarganegaraan serta kefarmasian dalam upaya pencegahan dan penanggulangan masalah narkotika di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi literatur, melalui penelusuran artikel ilmiah nasional dan internasional yang relevan dalam kurun waktu 5-10 tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai-nilai kewarganegaraan berperan penting dalam membentuk kesadaran hukum, tanggung jawab sosial, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika. Sementara itu, profesi kefarmasian memiliki kontribusi strategis melalui pengawasan penggunaan narkotika medis, penerapan prinsip penggunaan obat secara rasional, serta edukasi kepada masyarakat mengenai risiko penyalahgunaan narkotika. Sinergi antara kewarganegaraan dan

kefarmasian memungkinkan terbentuknya sistem pencegahan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan preventif. Dengan demikian, integrasi kedua peran tersebut menjadi kunci dalam memperkuat upaya nasional untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba secara berkelanjutan dan mewujudkan masyarakat yang sehat, sadar hukum, dan bertanggung jawab.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*



---

**Corresponding Author:**

Aulia Zahra Annabilah<sup>1</sup>

Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia

e-mail: [auliazahraannabilah2815@gmail.com](mailto:auliazahraannabilah2815@gmail.com)

---

**PENDAHULUAN**

Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat narkoba yang sangat memprihatinkan, di mana tren penyalahgunaan zat terlarang terus mengalami fluktuasi yang signifikan setiap tahunnya. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 1,73% atau setara dengan sekitar 3,3 juta jiwa penduduk dalam rentang usia 15-64 tahun. Fenomena ini menunjukkan bahwa pasar narkoba masih sangat masif dan menyasar berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pelajar hingga pekerja produktif, yang mengancam stabilitas ketahanan nasional (BNN, 2023).

Dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba tidak hanya terbatas pada kerusakan kesehatan fisik dan mental individu, tetapi juga merambah ke ranah sosial. Secara klinis, narkoba menyebabkan kerusakan sistem saraf pusat, gangguan organ dalam, hingga risiko kematian akibat overdosis. Sementara secara sosial, maraknya penyalahgunaan narkoba memicu peningkatan angka kriminalitas, keretakan rumah tangga, dan hilangnya produktivitas generasi muda yang seharusnya menjadi tulang punggung negara. Jika tidak ditangani secara sistematis, degradasi moral dan kesehatan publik ini akan menghambat pencapaian visi Indonesia Emas 2045 (Kementerian Kesehatan RI, 2021).

Ditinjau dari perspektif kewarganegaraan, setiap individu memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk berpartisipasi dalam upaya bela negara melalui pencegahan penyalahgunaan narkoba. Peran kewarganegaraan di sini diwujudkan melalui kesadaran hukum, ketahanan keluarga, dan keberanian masyarakat dalam melaporkan aktivitas ilegal di lingkungannya. Pendidikan kewarganegaraan menjadi instrumen vital untuk menanamkan nilai-nilai karakter dan integritas agar warga negara memiliki daya tangkal yang kuat terhadap pengaruh negatif budaya narkoba yang sering kali masuk melalui globalisasi (Kansil & Kansil, 2018).

Di sisi lain, peran profesi kefarmasian menjadi sangat krusial sebagai garda terdepan dalam pengawasan distribusi obat-obatan yang memiliki potensi disalahgunakan. Apoteker memiliki otoritas dan tanggung jawab profesional untuk memastikan bahwa sediaan farmasi psikotropika dan narkoba hanya digunakan untuk kepentingan medis dan ilmu pengetahuan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pengawasan ketat dalam rantai distribusi dan pemberian edukasi mengenai bahaya obat-obatan terlarang kepada pasien merupakan bentuk pengabdian profesi farmasi dalam melindungi masyarakat (IAI, 2019).

Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara kesadaran kolektif warga negara dengan kompetensi teknis tenaga kefarmasian guna menciptakan sistem pencegahan yang komprehensif. Tanpa adanya kolaborasi, upaya pemberantasan narkotika hanya akan berjalan secara parsial dan kurang efektif. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai pentingnya integrasi nilai-nilai kewarganegaraan dan etika profesi kefarmasian dalam merumuskan strategi pencegahan narkotika yang berkelanjutan di Indonesia. Melalui pemahaman yang holistik, diharapkan muncul solusi preventif yang mampu menekan angka penyalahgunaan narkotika secara signifikan (Sumarno, 2020).

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi literatur. Data diperoleh dari artikel ilmiah nasional dan internasional yang relevan dan diterbitkan dalam 5–10 tahun terakhir. Penelusuran dilakukan melalui Google Scholar, PubMed, ScienceDirect, dan Garuda menggunakan kata kunci terkait kewarganegaraan, kefarmasian, narkotika, dan pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Artikel yang memenuhi kriteria inklusi dianalisis secara deskriptif-analitik dengan mengelompokkan temuan berdasarkan peran kewarganegaraan, kontribusi kefarmasian, serta bentuk sinergi dalam penanganan masalah narkotika. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kondisi penyalahgunaan narkotika di Indonesia hingga saat ini masih menjadi persoalan serius yang mengancam ketahanan sosial dan generasi muda. Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga jalur transit peredaran narkotika internasional, sehingga peningkatan jumlah penyalahguna terjadi hampir di seluruh lapisan masyarakat. Faktor globalisasi, lemahnya kontrol sosial, serta tekanan lingkungan menjadi pemicu utama meningkatnya angka penyalahgunaan narkotika yang berdampak pada kesehatan, keamanan, dan stabilitas nasional (BNN, 2022).

Dalam perspektif kewarganegaraan, penyalahgunaan narkotika merupakan bentuk pelanggaran terhadap nilai dan tanggung jawab sebagai warga negara. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran hukum, sikap patuh terhadap peraturan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan pelaporan peredaran narkotika. Warga negara yang memiliki pemahaman nilai Pancasila dan konstitusi diharapkan mampu menjadi agen sosial dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari narkotika (Somantri, 2017).

Peran kefarmasian dalam penanggulangan narkotika sangat penting karena tenaga kefarmasian berada pada garda terdepan dalam pengelolaan obat, termasuk obat-obatan yang tergolong narkotika. Apoteker memiliki tanggung jawab profesional untuk memastikan penggunaan narkotika medis secara rasional, mencegah penyalahgunaan obat resep, serta memberikan edukasi kepada pasien dan masyarakat mengenai risiko ketergantungan narkotika. Dengan kompetensi klinis dan etik, kefarmasian berkontribusi langsung dalam perlindungan kesehatan masyarakat (Kementerian Kesehatan RI, 2019).

Sinergi antara kewarganegaraan dan kefarmasian menjadi kunci dalam upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika secara komprehensif. Nilai kewarganegaraan membangun kesadaran dan kepedulian sosial, sedangkan kefarmasian memberikan landasan ilmiah dan profesional dalam pengawasan serta penggunaan narkotika. Kolaborasi ini

memungkinkan terbentuknya sistem pencegahan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan preventif di tingkat masyarakat (Prasetyo & Rahmawati, 2020).

Dengan demikian, penanganan masalah narkoba di Indonesia tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan keterlibatan lintas sektor yang berkelanjutan. Penguatan peran warga negara yang sadar hukum serta optimalisasi peran kefarmasian dalam sistem kesehatan akan memperkuat upaya nasional dalam memerangi narkoba. Sinergi kedua bidang tersebut diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang sehat, bertanggung jawab, dan berdaya tahan terhadap ancaman narkoba (Widodo, 2021).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil telaah literatur yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari integrasi peran kewarganegaraan dan kefarmasian. Nilai-nilai kewarganegaraan berfungsi sebagai landasan pembentukan kesadaran hukum, tanggung jawab sosial, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan narkoba, sementara kefarmasian berperan melalui pengawasan penggunaan narkoba medis, penerapan prinsip rasionalitas obat, dan edukasi kesehatan berbasis keilmuan. Integrasi kedua aspek tersebut menunjukkan potensi signifikan dalam memperkuat pendekatan preventif terhadap penyalahgunaan narkoba.

Sinergi antara kewarganegaraan dan kefarmasian memberikan manfaat strategis dalam menciptakan sistem pencegahan yang komprehensif dan berkelanjutan. Pendekatan ini memungkinkan terjadinya keseimbangan antara aspek normatif, sosial, dan ilmiah dalam penanganan narkoba, sehingga tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga pada perlindungan kesehatan masyarakat dan penguatan ketahanan sosial. Kolaborasi lintas peran ini berkontribusi pada peningkatan efektivitas upaya pencegahan di tingkat individu, keluarga, dan komunitas.

Sebagai rekomendasi, diperlukan penguatan kebijakan dan program kolaboratif yang mengintegrasikan pendidikan kewarganegaraan dengan peran tenaga kefarmasian dalam sistem kesehatan. Optimalisasi peran apoteker dalam edukasi masyarakat, disertai peningkatan partisipasi warga negara yang sadar hukum, diharapkan mampu mendukung strategi nasional dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Narkotika Nasional (BNN). (2023). *Laporan Jurnal Data Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)*. Jakarta: BNN RI.
- Ikatan Apoteker Indonesia (IAI). (2019). *Standar Praktik Kefarmasian dan Etika Profesi Apoteker Indonesia*. Jakarta: Pengurus Pusat IAI.
- Kansil, C. S. T., & Kansil, C. (2018). *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). *Pedoman Pengelolaan Obat Narkoba dan Psikotropika di Fasilitas Pelayanan Kesehatan*. Jakarta: Kemenkes RI.



- Prasetyo, A., & Rahmawati, D. (2020). Sinergi peran masyarakat dan tenaga kesehatan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. *Jurnal Kewarganegaraan*, 4(2), 112–120.
- Sumarno. (2020). Sinergitas Masyarakat dan Tenaga Kesehatan dalam Penanggulangan Narkoba. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 5(2), 45-58.
- Somantri, M. N. (2017). Pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pembentukan kesadaran hukum generasi muda. *Jurnal Civic Education*, 1(1), 45–53.
- Widodo, S. (2021). Partisipasi warga negara dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di era globalisasi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Kewarganegaraan*, 6(1), 89–98.